

PERSEPSI MAHASISWA KEPERAWATAN TENTANG LIBERALISASI JASA KEPERAWATAN PADA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DI INSTITUSI PENDIDIKAN KEPERAWATAN DI KOTA BANDUNG DAN CIMAHI

¹⁾Windasari Aliarosa, ²⁾M. Ari Fardiansyah, ³⁾Aan Soman
^{1,2,3)}Prodi Pendidikan Ners STIKes Budi Luhur Cimahi

Abstrak

Mutual Recognition Arrangement (MRA) dalam jasa keperawatan merupakan salah satu nota pengakuan yang disusun dalam rangkaian Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persepsi mahasiswa keperawatan tentang liberalisasi jasa keperawatan (Nursing Services) pasca pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di institusi pendidikan keperawatan di Kota Bandung dan Cimahi. Adapun hal-hal yang diteliti, meliputi 1) MRA ASEAN pada jasa keperawatan, 2) sumber daya manusia pada pelayanan jasa keperawatan, 3) tata kelola/registrasi pada pelayanan jasa keperawatan, 4) infrastruktur pendukung pada pelayanan jasa keperawatan. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan cross sectional yang diikuti 455 responden dari 3 institusi pendidikan, di mana analisis data menggunakan SPSS, dan excel dalam mengkalkulasi mean, standar deviasi, dan rentang nilai skala untuk univariat dan Mann-Whitney U untuk meihat perbedaan persepsi antara mahasiswa D3 dan S1 Keperawatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi mahasiswa program sarjana dengan diploma tiga keperawatan tentang liberalisasi jasa keperawatan pasca pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN, namun mayoritas mahasiswa memiliki persepsi yang positif tentang liberalisasi jasa keperawatan pada Masyarakat Ekonomi ASEAN. Modul pembelajaran tentang Jasa Keperawatan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN telah disusun sebagai hasil luaran penelitian ini.

Kata Kunci : mahasiswa keperawatan, MEA, persepsi, *nursing services*

PERCEPTION OF NURSING STUDENTS ABOUT LIBERALIZATION OF NURSING SERVICES ASEAN ECONOMIC COMMUNITIES IN NURSING EDUCATION INSTITUTIONS IN BANDUNG AND CIMAHI

Abstract

The Mutual Recognition Arrangement (MRA) in nursing services is one of the acknowledgment notes prepared in the series of the ASEAN Economic Community (AEC). This study aims to identify the perceptions of nursing students about the liberalization of nursing services (Nursing Services) after the enactment of the ASEAN Economic Community (MEA) in nursing education institutions in the City of Bandung and Cimahi. As for the things studied, covering 1) ASEAN MRA on nursing services, 2) human resources on nursing services, 3) governance / registration on nursing services, 4) supporting infrastructure in nursing services. The research design used was descriptive quantitative with cross sectional approach followed by 455 respondents from 3 educational institutions, where data analysis used SPSS, and excel in calculating mean, standard deviation, and range of scale values for univariate and Mann-Whitney U to see differences perception between D3 and S1 Nursing students. The results showed that there was a significant difference between the perceptions of undergraduate students with three nursing diplomas about liberalization of nursing services after the enactment of the ASEAN Economic Community, but the majority of students had a positive perception of liberation of nursing services in the ASEAN Economic Community. The learning module on Nursing Services in the ASEAN Economic Community has been compiled as a result of this research.

Keywords : ASEAN Economy Community, *nursing student, nursing services*

Korespondensi:

Windasari Aliarosa

Program Studi Pendidikan Ners STIKes Budi Luhur Cimahi

Jl. Kerkof No. 243, Leuwigajah, Cimahi

Mobile: 082240044931

Email: waliarosa@gmail.com

Pendahuluan

Komunitas ASEAN 2015 merupakan suatu kesepakatan tentang pembentukan komunitas yang terdiri dari tiga pilar, yaitu 1) Masyarakat Ekonomi ASEAN, 2) Masyarakat Keamanan ASEAN, dan 3) Masyarakat Sosial-Budaya (Hakim, M.F., 2013). Pilar pertama dalam Komunitas ASEAN, yakni Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang ditandai dengan bebasnya aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan perpindahan barang modal secara lebih bebas antar negara di kawasan ASEAN (Siswandri, 2011, Fadli, M., 2014). Arus bebas tenaga kerja terampil tersebut harus dimanfaatkan oleh Indonesia sebagai peluang dalam menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran (Fadli, M., 2014).

Dalam cetak biru MEA tercantum kebebasan mobilitas bagi tenaga kerja terampil di kawasan ASEAN dan untuk memfasilitasinya telah terbentuk kesepakatan pengakuan tenaga profesional di bidang jasa yang diwujudkan dalam Nota Saling Pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement/MRA*). Nota Saling Pengakuan (MRA) ini sudah diberlakukan untuk jasa arsitektur, jasa akuntansi, kualifikasi survey, jasa keperawatan, praktisi medis, dan praktisi gigi (Siswindri, 2011). Salah satu MRA yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang jasa perawatan/tenaga keperawatan yang diteliti dari perspektif mahasiswa keperawatan.

Akselerasi penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN menuntut upaya-upaya persiapan yang maksimal dari negara-negara anggotanya termasuk Indonesia, khususnya di bidang jasa tenaga keperawatan. Berbagai permasalahan muncul baik dari segi kuantitas dan kualitas ketika menilai apakah jasa keperawatan Indonesia dapat ikut bersaing dalam pasar ASEAN. Diantara permasalahan tersebut, yakni 1) perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM perawat, 2) kelemahan berbahasa Inggris pada perawat Indonesia, 3) standar nasional keperawatan Indonesia yang belum menjadi ketentuan baku terhadap profesi perawat (proses sertifikasi dan jenjang pendidikan). Sehingga, dari permasalahan-permasalahan tersebut, munculah asumsi bahwa perlindungan hukum terhadap perawat dalam menghadapi MEA sangat lemah (Solehuddin, Safa'at, R., Winarno, B., 2015).

Sebagai negara dengan jumlah sumber daya manusia perawat yang paling besar di ASEAN, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk memanfaatkan integrasi di sector tenaga kerja terampil. Di Indonesia, pada tahun 2015, terdapat 223,910 tenaga perawat dari 647,170 tenaga kesehatan, yaitu sebanyak 34.6% dari seluruh tenaga kesehatan. Di mana mengandung makna bahwa perawat merupakan tenaga kesehatan dengan prosentase terbesar (Depkes, 2015). Sedangkan pada tahun 2014, jumlah perawat di Jawa Barat sebesar 53.6 % (Dinas Kesehatan Jawa Barat, 2014), dan sebesar 61.8 % jumlah perawat di Kota Bandung pada tahun 2015 (BPS, 2015). Di lain sisi, perkiraan tingkat permintaan perawat dari luar negeri terus meningkat pesat, pada tahun 2014 yang lalu permintaan perawat sebesar 9280 perawat, akan meningkat pada tahun 2019 sebesar 13,100 perawat dan tahun 2025 sebanyak 16,920 perawat (Kelialat, M., Virginita, A., Al Banna, S., Aryanto, A., 2013).

Bagi tenaga kerja perawat Indonesia, MEA memberikan peluang juga tantangan. Seorang perawat Indonesia mempunyai kesempatan bekerja bukan hanya di Indonesia tetapi juga di 9 negara ASEAN yang lainnya, namun perawat Indonesia yang bekerja di dalam negeri harus dapat bersaing dengan tenaga perawat yang berasal dari negara ASEAN lain yang bekerja di Indonesia. Namun, Kementerian Luar Negeri menyebutkan bahwa hingga saat ini Indonesia belum siap untuk menghadapi liberalisasi sector jasa keperawatan, walaupun sudah banyak tenaga perawat yang dikirim ke luar negeri, khususnya ke Jepang dan negara timur tengah.

Sudah 2 tahun MEA diberlakukan sejak tahun 2015. Peluang dan tantangan dari MEA ini harus sudah diperkenalkan sejak perawat masih dalam lingkungan akademik sebagai mahasiswa keperawatan, sebab hal ini terkait erat dengan kualitas yang dimiliki oleh mahasiswa perawat Indonesia. Fernandes, J., dan Andadari, R. (2012), menjelaskan bahwa

kualitas sangat terkait dengan kompetensi yang dimiliki para tenaga kerja Indonesia. Kompetensi tenaga kerja yang berkualitas diperoleh dari pengembangan kemampuan khusus melalui pendidikan di universitas atau sekolah tinggi. Oleh sebab itu, pendidikan di universitas memiliki peran yang cukup penting dalam menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi dan terampil. Namun, upaya universitas tidak selalu memberikan hasil yang optimal. Hal ini dikarenakan peran mahasiswa yang terlihat dalam niat dan motivasinya. Hal ini sejalan dengan Yuniarsih (2008) dalam Fernandez, J., dan Andadari, R. (2012) bahwa untuk membentuk kompetensi, seseorang perlu memiliki sebuah motif tentang apa yang secara konsisten dipikirkan atau keinginan yang mendorong perilaku seseorang yang mengarah pada kegiatan atau tujuan tertentu. Kondisi pasca diberlakukannya MEA seharusnya dapat menjadi motif bagi mahasiswa keperawatan untuk menyiapkan diri menjadi lebih baik.

Pendidikan merupakan satu dari berbagai industry yang akan terpengaruh dengan adanya MEA. Pendidikan diupayakan agar dapat mendukung MEA, sebab pendidikan merupakan faktor kunci yang akan membantu menciptakan pengetahuan dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan MEA (Sekretariat ASEAN, 2014 dalam Pyakurel, S., 2014). Selain itu, pendidikan juga berperan sebagai alat untuk mencapai kesadaran terhadap MEA dan menciptakan rasa pengertian terhadap kekayaan riwayat ASEAN, bahasa, dan nilai-nilai umum. Penilaian persepsi mahasiswa keperawatan dibutuhkan untuk melihat sejauh mana tingkat kesiapan mahasiswa setelah 2 tahun MEA berjalan, serta dari hasil tersebut dapat mengembangkan program-program yang dapat menumbuhkan kesiapan mahasiswa menghadapi liberalisasi jasa keperawatan setelah lulus dari institusi pendidikan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah persepsi mahasiswa keperawatan tentang liberalisasi jasa keperawatan pada Masyarakat Ekonomi Asean di institusi pendidikan keperawatan di Kota Bandung dan Cimahi.

Metode

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian adalah seluruh mahasiswa keperawatan di 3 institusi pendidikan keperawatan, yaitu di STIKes Budi Luhur Cimahi, STIKes Achmad Yani Cimahi, dan STIKep PPNI Bandung. Pengambilan sample menggunakan purposive sampling, dengan kriteria inkusi semua mahasiswa keperawatan yang berada di tingkat akhir Diploma tiga keperawatan dan Strata 1, dan berada di tempat penelitian saat pengambilan data berlangsung. Sedangkan kriteria eksklusi adalah mahasiswa yang tidak bersedia untuk menjadi responden dan tidak berada di tempat saat pengambilan data dilaksanakan. Jumlah sample yang didapatkan adalah 455 responden.

Instrument yang digunakan adalah Instrumen Persepsi Mahasiswa Keperawatan tentang Liberalisasi Jasa Keperawatan, yang dikembangkan oleh tim peneliti, diambil dari sumber Pemetaan Pekerja Terampil Indonesia dan Liberalisasi Jasa ASEAN: Laporan Penelitian ASEAN Study Center UI Bekerja Sama dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (2013). Instrumen ini dibuat sendiri oleh peneliti dan telah melalui tahap uji validitas. Penghitungan uji validitas dan uji reabilitas menggunakan aplikasi SPSS dengan jumlah responden sebanyak 20 orang, dan didapatkan hasil sejumlah 30 item pertanyaan yang valid karena didapatkan nilai r hitung lebih dari nilai r tabel yaitu 0,444. Dan pada uji reabilitas diperoleh nilai α cronbach 0,949 dimana nilai tersebut di atas 0,6 dengan demikian kuesioner yang digunakan bisa dikatakan konsisten.

Pada hari disebarluaskan kuesioner, responden mengumpulkan kembali kuesioner tersebut pada hari itu juga. Responden diberikan waktu sekitar 15 menit untuk mengisi kuesioner. Analisis data menggunakan perhitungan distribusi frekuensi dari persepsi. Sedangkan pada tahap ini peneliti menganalisis data secara univariat dan bivariate. Pada analisis data univariat,

peneliti mengelompokkan dan mengolah data berdasarkan preolehan total skor berdasarkan interval, seperti table di bawah ini:

Table. 1 Interpretasi Skor Berdasarkan Interval

Interval	Kategori
0 – 24,99%	Sangat Negatif
25% – 49,99%	Negatif
50% – 74,99%	Positif
75% – 100%	Sangat Positif

Untuk analisis bivariate, peneliti menguji adanya perbedaan antara persepsi mahasiswa program diploma tiga dengan strata satu dengan menguji hasil uji normalitas data. Setelah itu dilanjutkan dengan uji parametric atau non parametric. Uji non parametric yang digunakan adalah Uji Mann-Whitney.

Hasil

Proses analisis data menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Persepsi Mahasiswa Program Diploma Tiga Keperawatan Terhadap Liberalisasi Jasa Keperawatan Pasca Pemberlakuan MEA di Institusi Keperawatan di Kota Bandung dan Cimahi

	Dimensi	%	Kategori
A	MRA ASEAN pada pelayanan jasa keperawatan	75,71%	Sangat Positif
B	Sumber daya manusia pada pelayanan jasa keperawatan	68,57%	Positif
C	Tata kelola/Regulasi pada pelayanan jasa keperawatan	74,16%	Positif
D	Infrastruktur pendukung pada pelayanan jasa keperawatan	71,54%	Positif

Sumber: Data Primer 2018

Tabel 3. Persepsi Mahasiswa Program Strata Satu Keperawatan Terhadap Liberalisasi Jasa Keperawatan Pasca Pemberlakuan MEA di Institusi Pendidikan Keperawatan di Kota Bandung dan Cimahi

	Dimensi	%	Kategori
A	MRA ASEAN pada pelayanan jasa keperawatan	77,06%	Sangat Positif
B	Sumber daya manusia pada pelayanan jasa keperawatan	70,37%	Positif
C	Tata kelola/Regulasi pada pelayanan jasa keperawatan	74,45%	Positif
D	Infrastruktur pendukung pada pelayanan jasa keperawatan	75,41%	Sangat Positif

Sumber: Data Primer 2018

Tabel 4. Perbedaan Persepsi Antara Mahasiswa Program Diploma Tiga dan Strata Satu Keperawatan Tentang Liberalisasi Jasa Keperawatan Pasca Pemberlakuan MEA di Institusi Pendidikan Keperawatan di Kota Bandung dan Cimahi

Variable	N	Mean Rank	Sum of Rank	p value
Sarjana	193	240,33	50.195,50	
Diploma Tiga	246	204,05	46.384,50	0,031

Sumber: Data Primer, 2018

Pembahasan

Mahasiswa program diploma tiga keperawatan memiliki persepsi yang sangat positif pada item "MRA ASEAN pada pelayanan jasa keperawatan". Sedangkan pada mahasiswa strata satu keperawatan, selain memiliki persepsi yang sangat positif pada item "MRA ASEAN pada pelayanan jasa keperawatan", juga pada item "Infrastruktur pendukung pada pelayanan jasa keperawatan". Baik dari mahasiswa diploma tiga keperawatan maupun strata satu keperawatan memiliki persepsi yang sangat positif terhadap adanya MRA ASEAN pada pelayanan jasa keperawatan. Beberapa item dalam kuesioner bertanya tentang *Mutual Recognition Agreement* Negara-negara ASEAN pada pelayanan jasa keperawatan dimana 7 dari 8 pertanyaan lebih dari setengahnya dijawab dengan setuju dan sangat setuju. Tapi ada satu pertanyaan yang dijawab lebih dari setengahnya dengan kurang setuju dan tidak setuju yaitu tentang "Indonesia telah siap menerima tenaga perawat asing dari negara-negara ASEAN untuk bekerja di dalam negeri". Hal ini menunjukan di satu sisi mahasiswa punya persepsi positif namun di sisi lain ada hal-hal yang dirasa belum siap untuk bersaing dengan negara-negara ASEAN lain di negeri sendiri.

MRA (Mutual Recognition Arrangement) atau Nota Saling Pengakuan merupakan kesepakatan pengakuan tenaga profesional di bidang jasa yang dibuat dalam upaya mendukung liberalisasi sector jasa, terutama lalu lintas atau perpindahan tenaga kerja terampil (Siswandri, 2011). Keliat, M., Virgianita, A., Al Banna, S., dan Aryanto, A.C. (2013) menambahkan bahwa MRA merupakan langkah awal yang penting untuk mempromosikan perpindahan tenaga kerja terampil, di mana salah satunya adalah jasa tenaga professional perawat. MRA menjadi sangat penting sebab MRA mengatur bahwa negara tujuan atau negara penerima mengakui kualifikasi professional dan muatan latihan yang diperoleh dari negara pengirim atau negara asal tenaga kerja terampil. Selain itu, negara asal juga diberikan otoritas untuk mengesahkan kualifikasi dan pelatihan dengan cara memberikan diploma atau sertifikat. MRA pun meminta negara asal untuk membuat proses dalam penentuan standard dan persyaratan lainnya yang ditetapkan baik di negara penerima maupun di negara asal. Sehingga MRA dapat memfasilitasi mobilitas perawat professional di dalam negara-negara ASEAN, pertukaran informasi dan ahli dalam hal standard kualifikasi, mempromosikan pengadopsian praktik-praktik terbaik jasa perawat professional, dan menyediakan kesempatan-kesempatan untuk kegiatan peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi perawat-perawat tersebut (Keliat, M., Virgianita, A., Al Banna, S., dan Aryanto, A.C.,2013).

Item lain yang dipersepsikan sangat positif, terutama oleh mahasiswa strata satu keperawatan, adalah "Infrastruktur pendukung pada pelayanan jasa keperawatan". Pada item ini ditanyakan tentang regulasi pemerintah dan infrastruktur pendukung pada jasa layanan keperawatan, sebagian besar mahasiswa menjawab setuju dan sangat setuju. Hal ini menunjukan bahwa mahasiswa dan tenaga perawat sudah lebih menyadari akan pentingnya sebuah regulasi yang mengatur tentang profesi keperawatan. Institusi pendidikan keperawatan sebagai mesin produksi perawat-perawat Indonesia juga saat ini sedang berbenah untuk senantiasa meningkatkan kualitasnya agar bisa menghasilkan tenaga-tenaga perawat yang berkualitas pula dan bisa bersaing di kancah nasional dan internasional baik di dalam maupun

luar negeri. Serta peran organisasi profesi baik PPNI maupun AIPNI dan AIPVIKI dipandang sebagai organisasi yang memiliki peran dalam meningkatkan kualitas perawat-perawat Indonesia. Namun satu hal yang masih menjadi kekurangan bagi dunia keperawatan di Indonesia yaitu belum adanya *Board of Nursing / Nursing Council* atau yang lebih dikenal dengan konsil keperawatan, dimana dari hasil responden menjawab 91% dengan setuju dan sangat setuju. Berarti hal ini sangat ditunggu, karena keberadaan konsil keperawatan ini salah satu syarat agar kita bisa sejajar dengan negara ASEAN lainnya tentang praktik keperawatan, dimana hanya Indonesia sebagai negara yang terbesar dan salah satu pendiri ASEAN yang belum memiliki konsil keperawatan.

Hal ini sejalan dengan Keliat, M., Virgianita, A., Al Banna, S., dan Aryanto, A.C. (2013), infrastruktur kependidikan tidak hanya dilihat dari bentuk fisik tetapi juga dari sisi regulasinya. Oleh karena itu, asosiasi yang dapat memberikan sumbangsih dalam memperkuat jasa keperawatan dinilai sangat penting. Di Indonesia sendiri belum ada badan regulator keperawatan yang mandiri untuk menata system kredensial bagi perawat (*Board of Nursing/ Konsil Keperawatan*). Asosiasi yang ada saat ini adalah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI), dan Asosiasi Institusi Pendidikan Vokasi Keperawatan Indonesia (AIPVIKI). Ketiga asosiasi ini menjadi wadah komunikasi bagi perawat untuk membawa aspirasi perawat dan berperan untuk meningkatkan pelayanan mutu pendidikan dan pelayanan jasa keperawatan di Indonesia.

Sedangkan dua item yang lainnya, yaitu "Sumber daya manusia pada pelayanan jasa keperawatan" dan "Tata kelola/regulasi pada pelayanan jasa keperawatan", dipersepsikan positif baik oleh mahasiswa diploma tiga keperawatan maupun strata satu keperawatan. Pada item ini dikemukakan tentang sumber daya manusia pada pelayanan jasa keperawatan di mana persepsi mahasiswa cenderung positif dalam menilai sumber daya manusia keperawatan, walaupun masih ada sisi persepsi negatif yang ada seperti yang dimunculkan pada item pernyataan "Perawat Indonesia belum siap berkompetisi dengan perawat asing dari negara-negara ASEAN" yang dijawab setuju dan sangat setuju sebanyak 52%. Tapi sebaliknya pada item kualitas perawat indonesia masih rendah dan kompetensinya belum sesuai harapan, dijawab kurang setuju dan tidak setuju sebanyak 57% dan 52%. Hal ini menunjukan adanya keraguan dimana di satu sisi mahasiswa memandang perawat Indonesia belum siap bersaing tapi di sisi lain mahasiswa juga tidak ingin dipandang rendah dan tidak kompeten. Namun dalam hal ini bagi peneliti adalah suatu hal yang positif sehingga bisa menjadi stimulus bagi mahasiswa keperawatan untuk bisa berkembang dimasa yang akan datang.

Profesi perawat memiliki porsi terbesar dalam prosentasi tenaga kesehatan, tidak hanya di Indonesia akan tetapi juga secara global. Lebih jauh, seiring dengan perkembangan dan dinamika global, tercatat bahwa perawat merupakan salah satu profesi yang mengalami peningkatan tren kebutuhan dalam beberapa decade terakhir ini, tidak hanya di level ASEAN tetapi juga dunia. Oleh karena itu, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi tenaga perawat Indonesia, di antaranya adanya pemberlakuan entry barrier, yang menyebabkan sulitnya perawat asing masuk ke Indonesia, brain drain, yaitu usaha untuk menjaga kecukupan tenaga perawat, dan penempatan sector kesehatan sebagai salah satu pilar utama untuk menjaga ketahanan negara, sehingga pilar ini harus diproteksi. Selain itu, munculnya persaingan yang ketat dengan negara yang lainnya menjadi permasalahan tambahan, mengingat kualifikasi perawat Indonesia masih berstandar nasional (Keliat, M., Virgianita, A., Al Banna, S., dan Aryanto, A.C.,2013).

Dengan adanya persaingan yang ketat dan adanya liberalisasi sector jasa keperawatan, Indonesia harus dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM keperawatan, termasuk di antaranya kemampuan bahasa dan kualifikasi tenaga perawat, serta ditetapkannya regulasi-regulasi dari pemerintah untuk mendukung penguatan jasa keperawatan Indonesia agar siap bersaing di pasar ASEAN. Sedangkan untuk tata kelola/ regulasi liberalisasi jasa keperawatan, Indonesia telah memiliki Permenkes No. 47 tahun 2012 tentang Pendayagunaan Perawat

Keluar Negeri, Permenkes No. 317 tahun 2010 tentang Tenaga Kerja Warga Negara Asing, Permenkes No. 1796 tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan, UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang mengatur sertifikasi profesi dan sertifikasi kompetensi, dan Permenkes No. 17 tahun 2013 yang merupakan revisi Permenkes No. 148 tahun 2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik keperawatan.

Mengkaji dari hasil analisis uji non parametrik dengan menggunakan uji Mann-whitney U diperoleh hasil p value yaitu 0,031. Dimana hasil ini $< \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak, maka dalam hal ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara persepsi mahasiswa program sarjana dengan diploma tiga keperawatan tentang liberalisasi jasa keperawatan pasca pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Selain itu dari nilai *mean rank* program sarjana mempunyai nilai yang lebih tinggi, sehingga disini menunjukkan program sarjana mempunyai persepsi yang lebih positif terhadap liberalisasi jasa keperawatan pasca pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN dibandingkan dengan mahasiswa program diploma tiga keperawatan. Hal ini dapat dipahami bahwa tuntutan professional lebih dirasakan pada program strata 1 atau dikenal dengan program pendidikan ners, dibandingkan dengan program diploma tiga keperawatan ataupun vokasi.

Sejak dibukanya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang dalam bahasa Inggris *ASEAN Economic Community* pada tahun 2015 lalu, masyarakat professional perawat sudah bisa merasakan adanya nuansa persaingan antar negara-negara ASEAN, khususnya dalam bidang keperawatan walaupun persaingan secara langsung belum terlalu dirasakan. Namun jika telusuri lebih jauh persaingan itu sudah mulai tampak dilihat dari sudah adanya rumah sakit internasional yang pemilik sahamnya dari Negara Singapura, kemudian mata kuliah Bahasa Indonesia adalah salah satu mata kuliah yang diminati oleh mahasiswa Filipina, dan ditambah lagi negara-negara ASEAN selain Indonesia yang sudah siap lebih dahulu untuk bersaing di kancah Internasional seperti Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand hal ini menjadi fakta bahwa persaingan sudah dimulai. Bahkan negara ASEAN baru bergabung seperti Vietnam dan Kamboja sudah mulai mengejar ketertinggalannya dengan banyak menyekolahkan mahasiswa-mahasiswa keperawatan ke luar negeri.

Indonesia perlu melihat kesiapan professional keperawatan untuk bersaing dengan professional dari negara ASEAN. Dalam penelitian ini memberikan sedikit gambaran tentang kesiapan mahasiswa keperawatan dalam sisi persepsi terhadap liberalisasi jasa layanan keperawatan pasca pemberlakuan MEA yang menunjukkan bahwa mahasiswa keperawatan telah memiliki persepsi yang positif dan harus siap menghadapi liberalisasi jasa keperawatan ASEAN.

Simpulan dan Saran

Pada jenjang pendidikan diploma tiga keperawatan secara umum menunjukkan persepsi yang positif tentang liberalisasi jasa keperawatan pasca pemberlakuan MEA hanya pada poin tentang MRA ASEAN pada pelayanan jasa keperawatan yang menunjukkan persepsi sangat positif. Demikian halnya dengan mahasiswa program sarjana keperawatan yang menunjukkan persepsi positif, kecuali pada poin MRA ASEAN pada pelayanan jasa keperawatan dan poin infrastruktur pendukung pada pelayanan jasa keperawatan yang menunjukkan persepsi sangat positif.

Ada perbedaan yang signifikan antara program diploma tiga dengan sarjana keperawatan dalam persepsi tentang liberalisasi jasa keperawatan pasca pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dimana persepsi mahasiswa sarjana sedikit lebih positif dibanding dengan mahasiswa diploma tiga serta ditandai dengan nilai p 0,031 dimana $< \alpha = 0,05$. Sehingga menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan.

Saran bagi institusi pendidikan keperawatan sudah seharusnya menyediakan kurikulum pembelajaran yang bisa membentuk lulusan yang siap berkompetisi di kancah nasional maupun

internasional, juga membuka akses kerja sama dengan institusi pendidikan luar negeri baik dengan program *joint research, credit transfer, student exchange, faculty exchange*, atau *international conference*, karena dengan program-program ini akan menyamakan frekuensi kita dengan negara-negara lain yang juga sedang mempersiapkan persaingan global ini.

Selain itu, bagi profesi keperawatan baik organisasi profesi (PPNI, AIPNI, AIPVIKI) maupun perawat secara individu harus mendorong segera dibentuknya konsil keperawatan sebagai payung utama bagi profesi perawat yang menentukan regulasi keperawatan, dan agar bisa sejajar dengan profesi keperawatan di negara-negara ASEAN. Dan terakhir, bagi mahasiswa keperawatan harus senantiasa meningkatkan semangat belajar dan membuka wacana dan wawasan internasional diawali dengan meningkatkan kemampuan berbahasa asing khususnya bahasa Inggris sebagai salah satu indikator kesiapan dalam bersaing dengan negara lain, karena kendala perawat Indonesia untuk bersaing bukan pada *skill* dan kompetensi, namun pada kepercayaan diri ketika berkomunikasi dengan orang dari negara lain.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. 2015. Kota Bandung dalam Angka. Bandung: Badan Pusat Statistik. https://bandungkota.bps.go.id/website/pdf_publikasi/Kota-Bandung-Dalam-Angka-2015.pdf, diunggah tanggal 17 Februari 2017

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2015. Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2015. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia <http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/profil-kesehatan-indonesia-2015.pdf>, diunggah tanggal 20 Februari 2017

Dinas Kesehatan Jawa Barat. 2014. Profil Kesehatan Provinsi Jawa Barat. <http://www.diskes.jabarprov.go.id/dmdocuments/0ce8aa75df6bcc668324dbf0b828479.pdf>, diunggah tanggal 20 Februari 2017

Fadli, M. 2014. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional. Vol 3 No. 2, Agustus 2014, Hal 255, ISSN 2089-9009 <http://www.rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal/782524JURNAL%20VOLUME%203%20NO%202%20PROTECT.pdf#page=39>, diunggah tanggal 20 Februari 2017

Fernandes, J., Andadari, R. 2012. Persepsi Mahasiswa terhadap Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Disampaikan dalam Pekan Ilmiah Dosen-UKSW. http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/1292/5/PROS_Jose%20F-Roos%20KA_Persepsi%20Mahasiswa%20Terhadap%20Pemberlakuan_Full%20text.pdf, diunggah tanggal 17 Februari 2017

Hakim, M.F. 2013. ASEAN Community 2015 dan Tantangannya pada Pendidikan Islam di Indonesia,

Keliat, M., Virgianita, A., Al Banna, S., Aryanto, A.C. 2013. Pemetaan Pekerja Terampil Indonesia dan Liberalisasi Jasa ASEAN: Laporan Penelitian ASEAN Study Center UI Bekerja Sama dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Jakarta: ASEAN Study Center FISIP UI. <http://www.kemlu.go.id/Documents/Penelitian%20BPPK%202014/Laporan%20Akhir%20Liberalisasi%20Jasa.pdf>, diunggah tanggal 3 Maret 2017

Pyakurel, S. 2014. ASEAN Economic Community and Its Effects on University Education: A Case Study of Skill Verification by the Means of Professional Certification Examination. Dissertation: The Graduate School of Bangkok University. <http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/1052/1/shilpa.pyak.pdf>, diunggah tanggal 2 Januari 2017

Siswandri. 2011. Peran Asean Economic Community (AEC) terhadap Kebijakan Liberalisasi Tenaga Kerja Indonesia (Studi Kasus Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia). Skripsi. Universitas Sumatra Utara

Solehuddin, Safa'at, S., Winarno, B. 2015. Perlindungan Hukum terhadap Perawat dalam Menghadapi Asean Economic Community (AEC) [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=346615&val=6466&title=PERLINDUNGAN%20HUKUM%20TERHADAP%20PERAWAT%20DALAM%20MENGHADAPI%20ASEAN%20ECONOMIC%20COMMUNITY%20\(AEC\)](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=346615&val=6466&title=PERLINDUNGAN%20HUKUM%20TERHADAP%20PERAWAT%20DALAM%20MENGHADAPI%20ASEAN%20ECONOMIC%20COMMUNITY%20(AEC)), diunggah tanggal 5 Maret 2017

Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini didanai oleh Kemenristek Dikti pada skema Penelitian Dosen Pemula tahun 2017-2018.